

PENGEMBANGAN CSR DI BIDANG KEAGAMAAN DAN DAMPAKNYA PADA KESEHATAN DAN KEBERHASILAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) SE KOTA DENPASAR

**Oleh :
GINE DAS PRENA¹**

ABSTRAK

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan sebuah lembaga pendukung di setiap pedesaan adat di Bali. masing-masing; setiap langkah dan upaya make-up pertumbuhan kinerja LPD akan sangat dipengaruhi oleh cara hidup dan kebiasaan masing-masing desa adat itu sendiri.

LPD sebagai dimanfaatkan oleh lembaga jumlah pembiayaan yang lebih adalah kehadiran masyarakat itu sendiri pedesaan sampai untuk pengembangan adalah penting lebih jurusan apa yang menjadi kegemaran dan nafsu makan masyarakat itu sendiri. masyarakat Bali Kustom umumnya dan khususnya di Denpasar mewakili masyarakat dengan kebiasaan yang menghormati keberadaan kegiatan sosial, budaya dan agama. latar belakang ini kemudian menjadi masalah bagi resech ini yaitu:

Apakah kegiatan sosial khasiat mendukung LPDt di Denpasar, 2.whether kegiatan budaya yang mendukung keberhasilan LPD di Denpasar 3. apakah kegiatan agama mendukung keberhasilan LPD di Denpasar, 4. apakah kolektif sama mendukung keberhasilan LPD di Denpasar.

Hasil pengujian statistik mengungkapkan hal sebagai berikut: Berdasarkan hasil pemeriksaan F [count / hitung] diperoleh nilai f sama dengan 441.094 dengan signifikansi 0,000 yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Kegiatan agama menunjukkan variabel (X1) ini memiliki efek pada signifikan terhadap keberhasilan LPD (Y).

Hasil uji t kegiatan agama variabel sama dengan 2.380 oleh sig. sama dengan 0017 yang berada di bawah 0,05. Ada oleh H0 diterima, ini berarti kegiatan agama memiliki hubungan dengan LPD khasiat.

¹ Undiknas University

Hasil regresi linier berganda menghasilkan persamaan $Y = 0,62 + 0,190X_1$ di mana setiap kenaikan 1% dalam kegiatan agama akan meningkatkan kinerja LPD yang sama dengan 19%.

Kata kunci : kegiatan agama dan kinerja LPD

ABSTRACT

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) represent an supporting institute in each custom countryside in Bali. each;every step and effort make-up the growth of performance LPD will very influenced by way of living and habit each custom countryside itself.

LPD as exploited by more amount financing institute is attendance by society of itself countryside till for its development is importance more majoring what becoming exasperation and appetite society itself. society of Bali Custom generally and specially in Denpasar represent the society with the habit which respect the existence of social, cultural and religion activity. This background then become the problems for this resech that is :

Whether social activity supporting efficacy LPD in Denpasar; 2.whether culture activity supporting efficacy LPD in Denpasar 3. Whether religion activity supporting efficacy LPD in Denpasar, 4. Whether collectively is equal supporting efficacy LPD in Denpasar.

Result of statistical examination express the matter as follows: Pursuant to result of examination F [count/calculate] obtained f value equal to 441,094 by signifikansi 0,000 which its value smaller than 0,05. This show variable (X_1) religion activity has an effect on the signifikan to efficacy LPD (Y).

Result of test of t of variable religion activity equal to 2,380 by sig. equal to 0,017 which is under 0,05. There by H_0 accepted, this means religion activity have an relation to the efficacy LPD.

result of multiple linear regression result the equation $Y=0,62+0,190X_1$ where each;every increase 1% in religion activities will improve the LPD performance which equal to 19%.

Key word : religion activities and LPD performance

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bali sebagai salah satu destinasi dunia merupakan pulau dengan kebudayaan dan adat istiadat yang sangat kuat. Masyarakatnya yang majemuk tidak mengurungkan Bali sebagai

wilayah yang masih menjunjung budaya berkelompok dan budaya berbanjar yang kuat. Absolutisme masyarakat Bali menyebabkan desa dengan berbagai perangkatnya memiliki suatu bentuk hukum adat dengan berbagai tata krama pergaulan hidup yang diwariskan secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Dasar pemikiran tersebut membawa pihak pemerintah setempat memperbolehkan pihak desa yang diayomi dengan keberadaan hukum adat yang kuat dapat mengelola sistem keuangan dan sistem pendanaannya sendiri. Hal inilah yang mendorong terciptanya Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya, sehingga perlu diayomi, dilestarikan dan diberdayakan. Dalam kegiatan masyarakat desa banyak diatur oleh adat istiadat, norma – norma, upacara dan agama. Banjar merupakan suatu kelompok sosial yang menjadi pusat orientasi masyarakat desa untuk melakukan kegiatan guna menumbuhkan sifat solidaritas, gotong royong dan rasa kebersamaan dari warga desa. Dengan kemajuan kota Denpasar yang semakin pesat serta untuk mendukung program Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera (Mandara) maka banyak tumbuh dan berkembang sekaa – sekaa dan pasraman. Sebagai daerah wisata budaya kota Denpasar dihadapkan pada tantangan dan modernisasi sehingga perlu menumbuhkan kreatifitas sosial guna melestarikan budaya dan agama bagi masyarakat desa.

Masyarakat secara keseluruhan memiliki peranan penting sebagai pendukung dalam pelaksanaan kegiatan agama seperti pelestarian nilai agama Hindu di kalangan warga desa adat. Kebutuhan sustainability suatu lembaga pemerintahan dalam hal ini perangkat desa memerlukan juga suatu bentuk sokongan pendanaan dan langkah yang dilalui oleh desa untuk mempertahankan suatu sokongan pendanaan adalah melalui pembentukan lembaga pendanaan mandiri. Salah satu lembaga keuangan yang ada di desa adat yang mampu mengatasi permasalahan keuangan sekaligus menjadi lembaga pendanaan yang bersifat mandiri adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Lembaga ini berfungsi sebagai badan simpan pinjam milik desa adat, guna meningkatkan pemahaman masyarakat krama desa dalam upaya menjaga dan memelihara nilai-nilai adat budaya masyarakat desa agar keberadaannya tetap stabil. Berkaitan dengan fungsi LPD diatas maka LPD yang ada di Kota Denpasar berusaha untuk dapat menghasilkan laba dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 yang dapat dilihat pada tabel 1.

Perkembangan laba/keberhasilan lembaga perkreditan desa di Kota Denpasar dari tahun 2012-2015 sebagai berikut :

Tabel 1
Perkembangan laba/keberhasilan lembaga perkreditan desa
di Kota Denpasar dari tahun 2012-2015

No.	Tahun	Keberhasilan / laba (Rp.)
1.	2012	136.914.195,00
2.	2013	150.724.761,00
3.	2014	159.944.172,00
4.	2015	170.681.302,00
	Jumlah	618.264.430,00

Sumber : Pembina Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten / Kota (PLPDK)

B. Tujuan Penelitian

Dalam pengelolaan LPD sebagai suatu satuan usaha seperti yang disebutkan dalam Sattement of financial accounting concepts SFAC No 1 disebutkan bahwa tujuan pelaporan keuangan dan peningkatan laba tidak terbatas pada isi dari laporan keuangan tetapi juga media pelaporan lainnya. Dengan kata lain cakupan pelaporan keuangan adalah lebih luas dibandingkan dengan laporan keuangan. FASB menyebutkan pelaporan keuangan mencakup tidak hanya laporan keuangan tetapi juga media pelaporan informasi lainnya yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem informasi akuntansi. Namun laporan konvensional saat ini belum mampu menyajikan sumber ekonominya yaitu informasi yang sifatnya komprehensif dengan informasi keuangan. Hal ini memberi dampak tidak lengkap, tidak valid dan menyesatkannya laporan keuangan yang digunakan untuk pembuatan keputusan. Menyikapi adanya keterbatasan dalam laporan konvensional maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana keberadaan kegiatan corporate social responsibility bidang keagamaan terhadap kesehatan keberhasilan Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

C. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar sebagai berikut :

1. Diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat meningkatkan peran serta LPD terhadap keagamaan .
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk tetap melaksanakan kegiatan keagamaan dalam rangka memupuk rasa kesatuan di lingkungan desa adat agar tercipta kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.

3. Bagi Pemerintah Kota Denpasar, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam menentukan dan menerapkan kebijakan CSr terutama bidang keagamaan.

II. TELAAH PUSTAKA

A. Teori Pensinyalan

Teori Persinyalan menurut Brigham dan Houston (2006: 39) merupakan suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. *Teori pensinyalan* menjelaskan alasan perusahaan memiliki insentif untuk melaporkan secara sukarela informasi kepasar modal maupun pihak *stake holder (masyarakat)* meskipun tidak ada mandat dari badan regulasi. Pelaporan informasi oleh manajemen bertujuan untuk mempertahankan investor maupun persepsi masyarakat yang tertarik pada badan (perusahaan). Informasi keuangan yang disampaikan badan (perusahaan) bertujuan untuk mengurangi *information asymmetry* antara perusahaan dengan pihak eksternal perusahaan (Wolk et al. 2008).

B. Teori Sosial, Budaya dan Agama

Retzer (2012) menyatakan bahwa paradigma sosial adalah salah satu aspek yang sangat khusus, dalam analisis tentang tindakan sosial (*sosial action*). Konsep ini tidak memisahkan antara struktur sosial dengan pranara sosial. Kedua hal ini membantu membentuk tindakan manusia yang penuh arti atau penuh makna. Paradigma perilaku sosial dalam Ilmu Sosial sudah dikenal sejak lama, khususnya dalam psikologi.

Menurut Immanuel (2004) Ilmu Sosial adalah salah satu pewaris kearifan. Meskipun ia merupakan ahli waris yang tidak pernah bersyukur serta menyangkal "leluhurnya" dikatakan demikian sebab Ilmu Sosial pernah didefinisikan dirinya sebagai upaya pencarian kebenaran-kebenaran yang menghampiri kearifan yang telah ada atau yang telah dideduksikan. Jadi Ilmu Sosial adalah usaha penjelajahan dunia modern, yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosial, dimana membentuk struktur sosial yang terjadi pada masyarakat yang mempunyai mobilisasi terbuka terhadap penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu. Sedangkan integrasi sosial diperlukan agar masyarakat tidak bubar meskipun menghadapi tantangan.

Menurut Campbell (1994) bahwa kehidupan manusia tak terpikirkan diluar masyarakat individu dan tak bisa hidup dalam keterpencilan. Manusia membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup dan untuk mengaktualisasi diri sebagai manusia.

Craib (1986) menyatakan bahwa realisme tindakan sosial adalah penyebaran dan penggunaan, makna-makna dalam membentuk sikap, maksud dan tindakan. Hal ini mencakup

penjelasan yang jelas, interaksionalisme simbolik membawa kita kearah pembicaraan dari proses ini, sedangkan etnometodologi memberikan beberapa langkah untuk mengidentifikasi aturan-aturan yang diikuti.

Gorda (1999) menyatakan pengertian tentang proses yang merupakan suatu rangkaian perbuatan manusia yang mengandung maksud tertentu dan memang dikehendaki oleh orang yang melakukan kegiatan itu secara terus menerus. Dengan demikian pengertian proses diatas memberi informasi bahwa kegiatan mencapai tujuan secara bertahap dan berkelanjutan.

- Kegiatan agama adalah usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna keberadaan alam semesta yang dapat meningkatkan kebahagiaan bathin.

Geria (2010) para ahli Ilmu Humaniora berpendapat bahwa kebudayaan memiliki fungsi yang sangat hakiki bagi kehidupan manusia, secara individu maupun kolektif. Secara individual, kebudayaan berfungsi membentuk kepribadian dasar, harkat dan martabat kemanusiaan. Secara kolektif, kebudayaan berfungsi sebagai perekat solidaritas kelompok, pemberian identitas dan wawasan dalam segenap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pada masa pemerintah Airlangga (1019-1042), Mpu Kuturan tiba di Bali dimana saat itu dalam keadaan beragam yaitu banyak sekte. Mpu Kuturan berusaha mempersatukan seluruh sekte di Bali dengan mengembangkan konsep Tri Murti. Dimana saat itulah terjadi perubahan yang sangat besar dalam tata keagamaan di Bali. Mpu Kuturan mengajarkan konsep khayangan di Bali. Dari konsep itulah Tri Murti diproyeksikan pada tiap-tiap desa pakraman yang memiliki kayangan tiga yaitu sebagai berikut :

1. Pura Desa/Bale Agung tempat pemujaan Dewa Brahma sebagai manifestasi Ida Sang Hyang Widhi dalam fungsinya sebagai "Pencipta" alam semesta beserta isinya.
2. Pura Puseh tempat pemujaan Dewa Wisnu sebagai manifestasi Ida Sang Hyang Widhi dalam fungsinya sebagai "Pemelihara" alam semesta beserta isinya
3. Pura Dalem tempat pemujaan Dewa Siwa sebagai manifestasi Ida Sang Hyang Widhi dalam fungsinya sebagai "Pralina" alam semesta beserta isinya.

Dalam kenyataan konsep Tri Murti telah berhasil menyatukan tiga unsur kehidupan kemasyarakatan di Bali. Ketiga unsur tersebut adalah unsur ketuhanan (khayangan tiga), unsur wilayah (pelemahan) unsur manusia (pawongan) yang dikenal sebagai Tri Hita Karana. Mpu Kuturan menganjurkan pembuatan sanggah kemulan di tiap-tiap keluarga, artinya tempat asal atau kelahiran atau leluhur yang menurunkan. Demikian juga istilah kawitan yang berarti asal mula. Sanggah kemulan adalah tempat roh leluhur yang telah disucikan dalam upacara memukur. Upacara mamukur disebut upacara Dewa Pitra Prasitha atau Atma Prastita.

Titib (2009) menyatakan bahwa pengertian ketuhanan (teologi) dalam agama Hindu perlu memahami simbol-simbol yang menguraikan tentang hakekat ketuhanan dalam agama Hindu. Dengan demikian yang menjadi sumber adalah kitab suci Veda, yang merupakan himpunan sabda Tuhan Yang Maha Esa atau wahyuNya yang diterima oleh para Maharesi pada masa silam.

Bila kita, mengkaji kitab suci Veda dan praktek keagamaan di India dan Indonesia (Bali) maka Tuhan Yang Maha Esa itu tidak berwujud, baik dalam pengertian materi maupun dalam jangkauan pikiran manusia. Di dalam bahasa sanskerta di sebut Acinty Arupa yang artinya : tidak berwujud dalam alam pikiran manusia.

Menurut Gorda (1999) bahwa agama Hindu adalah keyakinan hidup yang disadari oleh ajaran-ajaran suci yang diwahyukan oleh Tuhan yang kekal abadi. Ajaran tersebut mencakup seluruh jalan kehidupan untuk mencapai kebahagiaan, baik yang menyangkut kebahagiaan duniawi (jagadhita) maupun kebahagiaan surgawi (moksa). Agama Hindu mengajarkan kepada setiap umatnya untuk mencapai jagathita dan moksa Hakekat dan tujuan hidup akan menjadi faktor utama dalam memutuskan sesuatu dari beberapa kemungkinan yang ada, misalnya di dalam melaksanakan yajna (persembahan), di dalam memberi dana-punya, atau di dalam melaksanakan tapa brata (pengendalian diri) atau dalam menentukan macam dan luas persembahan (yajna), luas kegiatan (karma).

Dalam Bhagawad Gita (III. 10) dikatakan bahwa Tuhan telah menciptakan alam semesta beserta isinya dan kemudian menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna bila dibandingkan dengan makhluk-mahluk ciptaan-Nya. Dimana manusia mampu membedakan perilaku yang baik dan yang buruk melalui keunggulan rohaninya (pikiran, budi dan atman). Harapan Tuhan agar manusia di dalam memanfaatkan alam semesta beserta isinya selalu menjaga kelestariannya agar menjadi sumber kehidupan yang abadi melalui kerja dengan persembahan (yajna).

C. Peraturan Pelaporan Keuangan di Indonesia

Akuntansi merupakan suatu area aktivitas ekonomi dengan tingkat regulasi yang sangat tinggi (Scott, 2000). Pemerintah secara langsung terlibat dalam regulasi melalui hukum atau undang-undang yang mengatur profesi akuntansi dan melalui peraturan tentang pengungkapan minimum dalam laporan keuangan dan prospektus. Terdapat tiga alasan diperlukan regulasi, yaitu kegagalan pasar, keinginan untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Beberapa sumber kegagalan pasar, antara lain informasi sebagai barang publik dan asimetri informasi (Buckley & O'Sullivan, 1980; Cooper & Keim, 1983; Watts & Zimmerman, 1986; Wolk & Tearney, 2001; dan Scoot, 2000). Suatu barang disebut barang publik jika barang tersebut dapat dikonsumsi oleh satu atau beberapa orang, tanpa mengurangi

jumlah yang dikonsumsi oleh lainnya (Davis & Meyer, 1983). Artinya keuntungan (*benefits*) barang publik dapat dinikmati oleh sejumlah besar individu.

Healy dan Palepu (2010) menyatakan bahwa regulasi pengungkapan lebih dimotivasi oleh perhatian (*by concern*) dibandingkan dengan kegagalan pasar, artinya regulasi ditekankan untuk melindungi investor yang *unshophisticated*. Penetapan pengungkapan minimum dimaksudkan untuk mengurangi *information gap* antara investor yang *informed* dengan *uninformed*. Regulasi dimaksudkan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik (Cooper & Kim 2001). Sedangkan Wolk dan Tearney (2001) menyatakan bahwa regulasi diperlukan karena kegagalan pelaporan keuangan dan auditing.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan perusahaan digunakan oleh investor untuk pembuatan keputusan investasinya. Selain investor, laporan keuangan juga digunakan oleh pihak-pihak lain untuk membuat keputusan sesuai dengan kepentingan pihak tersebut. Penyampaian informasi keuangan sesegera mungkin kepada publik dapat mempengaruhi aktivitas pasar dan harga sekuritas perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI. Pada Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dinyatakan secara jelas bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental lainnya kepada Bapepam.

Pada tahun 1996, Bapepam mengeluarkan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-80/PM/1996, yang mewajibkan bagi setiap emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan auditor independennya kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan. Ketentuan yang lebih spesifik tentang pelaporan perusahaan publik diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-38/PM/2003 tentang Laporan Tahunan yang berlaku sejak tanggal 17 Januari 1996. Kemudian pada tanggal 7 Desember 2006, untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada publik, diberlakukanlah Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan (LK) Nomor X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik.

Sejak tanggal 30 September 2003, Bapepam semakin memperketat peraturan dengan dikeluarkannya Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 ini menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan dan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.6 dinyatakan bahwa dalam hal penyampaian laporan

tahunan dimaksud melewati batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, maka hal tersebut diperhitungkan sebagai keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan.

D. Penelitian Terdahulu

Mahasiswa Program Studi Magister Program Ilmu Sosial Bidang Kajian Utama Ilmu Pemerintahan Universitas Pajajaran Bandung 2009, Ni Kadek Sarini melaksanakan Penelitian tentang Pengaruh Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut :

1. Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) belum maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja LPD berada pada katagori sedang yaitu disebabkan oleh :
 - Keterbatasan modal dan kekayaan yang dimiliki oleh LPD sehingga mempengaruhi efisien atau produktifitas LPD
 - Pola rekrutmen dan seleksi pegawai belum sepenuhnya berjalan dengan baik, sistem pendidikan dan pelatihan yang belum sesuai dengan kebutuhan, belum ada kepastian dan jaminan dalam promosi, karir, rendahnya kesejahteraan pegawai.
 - Pembinaan terhadap operasional LPD masih kurang dan partisipasi masyarakat belum dilibatkan secara penuh.
2. Kemajuan yang telah dicapai melalui keunggulan dalam organisasi yang melibatkan desa adat sebagai subjek maupun obyek pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari efisiensi, efektivitas dan keekonomisan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang akan menentukan sejauh mana tingkat kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa adat yang dilayani oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) rata-rata berada dalam kondisi cukup baik.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung belum maksimal. Hal ini secara langsung berpengaruh terhadap belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang disebabkan bantuan pinjaman yang diberikan belum maksimal. Sehingga terdapat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung dimana semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung.

Penelitian selanjutnya mahasiswa program Megister Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Denpasar 2011, I Kadek Dwi Laba melaksanakan penelitian tentang

evaluasi kinerja lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Celuk Sukwati Gianyar. Hasil penelitian menunjukkan :

1. Tingkat kinerja lembaga perkreditan Desa menunjukkan bahwa dalam mendapatkan laba tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari rentabilitas melebihi target sebesar 1,5%.
2. Berdasarkan Loan Deposit Rasio Lembaga Perkreditan Desa termasuk kategori sehat, namun apabila dilihat dari tingkat likwiditasnya mengalami peningkatan, namun masih dibawah target minimal.

III. METODE PENELITIAN

A. Hipotesis Penelitian

Salah satu strategi Pemerintah Kota Denpasar yaitu menggali potensi masyarakat pedesaan untuk meningkatkan sarana dan prasarana perekonomian adalah dengan pengembangan LPD. Dalam penegembangan operasional LPD dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat karena ruang lingkup operasionalnya terbatas pada wilayah dan lingkungan desa pekraman. Peredaran uang LPD melalui tabungan, deposito maupun pinjaman yang dilakukan oleh warga masyarakat akan mempengaruhi perolehan laba LPD. Pemberian kredit kepada masyarakat dapat meningkatkan aktifitas ekonomi atau kegiatan perusahaan agar dapat menjalankan fungsi guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat, memperoleh laba agar kelangsungan hidup LPD dapat terjamin, mengingat pemberian kredit merupakan kegiatan utama LPD dan penghasilan pokok LPD.

Modal lembaga perkreditan desa terdiri dari swadaya masyarakat sendiri dan atau urunan krama desa, bantuan pemerintah.

Lembaga perkreditan desa dipimpin oleh badan pengurus yang terdiri dari seorang kepala, seorang tata usaha / pembukuan dan seorang kasir. Tata cara pembinaan oleh pemerintah kabupaten/kota sehingga dalam pembagian keuntungan lembaga perkreditan desa pada akhir tahun sudah ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|---|------|
| 1. Cadangan modal | 60 % |
| 2. Dana pembangunan desa | 20 % |
| 3. Jasa produksi | 10 % |
| 4. Dana pembinaan / pengawasan dan perlindungan | 5 % |
| 5. Dana sosial | 5 % |

Dalam prinsip otonomi daerah menurut Undang – Undang Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Dimana didalamnya termuat :

1. Desa *pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Banjar *pakraman* adalah kelompok masyarakat yang merupakan bagian desa pakraman.
3. *Krama desa/krama* banjar adalah mereka yang menempati karang desa *pakraman* dan atau bertempat tinggal di wilayah desa/banjar *pakraman* atau di tempat lain yang menjadi warga desa *pakraman/banjar* pakraman.
4. *Krama pengempon/pengemong* adalah krama desa *pakraman/ krama* banjar *pakraman* yang mempunyai ikatan lahir dan batin terhadap kahyangan yang berada di wilayahnya serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, perawatan, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan upacara di *kahyangan* tersebut.
5. *Krama penyungsong* adalah *krama desa pakraman/krama* banjar *pakraman* yang mempunyai ikatan batin terhadap suatu *kahyangan* dan atau ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan, perawatan, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan upacara berupa dana punia.
6. *Palemahan* desa pakraman adalah wilayah yang dimiliki oleh desa *pakraman* yang terdiri atas satu atau lebih palemahan banjar *pakraman* yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
7. Tanah *ayahan* desa *pakraman* adalah tanah milik desa *pakraman* yang berada baik di dalam maupun di luar desa pakraman.
8. *Awig-awig* adalah aturan yang dibuat oleh *krama* desa *pakraman* dan atau *krama* banjar *pakraman* yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan desa mawacara dan dharma agama di desa *pakraman/banjar* pakraman masing-masing.
9. *Prajuru* desa *pakraman/banjar pakraman* adalah pengurus desa *pakraman/banjar pakraman* di Propinsi Bali.
10. *Paruman* desa/banjar *pakraman* adalah paruman permusyawaratan/permufakatan *krama* desa *pakraman/banjar* yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam desa *pakraman/ banjar pakraman*.
11. *Paruman* alit adalah sidang utusan prajuru desa *pakraman* sekecamatan yang mempunyai kekuasaan tertinggi di kecamatan.
12. *Paruman* madya adalah sidang utusan *paruman* prajuru desa *pakraman* sekabupaten/kota yang mempunyai kekuasaan tertinggi di kabupaten/kota.
13. *Paruman* agung adalah sidang utusan *parajuru* desa *pakraman* se-Bali yang mempunyai kekuasaan tertinggi di Propinsi.
14. *Pacalang* adalah satgas (satuan tugas) keamanan tradisional masyarakat Bali yang mempunyai wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, baik ditingkat banjar *pakraman* dan atau di wilayah desa *pakraman*.

15. *Pengayoman* adalah memberi perlindungan kepada desa *pekraman*.
16. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan desa *pakraman* dapat lestari dan makin kokoh sehingga berperan positif dalam pembangunan.
17. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai adat budaya masyarakat Bali terutama nilai etika, moral, dan peradaban yang merupakan inti adat istiadat dan tradisi masyarakat Bali agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang masih harus diuji secara empiris, namun dapat dikemukakan; 1. hipotesis hendaknya menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih; 2. hipotesis dinyatakan dalam kalimat pernyataan; 3. hipotesis dirumuskan secara jelas dan padat; 4. hipotesis dapat diuji kebenarannya.

Hendaknya menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih; pertautan antara dua variabel atau lebih; Hipotesis di dalam penelitian adalah sebagai berikut :

H1; Kegiatan keagamaan di masyarakat kota Denpasar ikut menunjang kesehatan keberhasilan lembaga perkreditan desa. Artinya apabila keikutsertaan LPD dalam CSR dalam bentuk bantuan kegiatan keagamaan di masyarakat kota Denpasar meningkat maka akan terjadi peningkatan laba lembaga perkreditan desa (semakin berhasil).

B. Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Variable dependen atau variable bebas dalam penelitian ini adalah kinerja LPD (Lembaga Perkreditan Desa). Kinerja LPD yang dimaksud adalah kemampuan LPD dalam menghasilkan laba bersih usaha pada laporan keuangan tahunan yakni setelah tanggal 31 Desember.

2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah jumlah yang dikeluarkan oleh pihak LPD ke desa setempat melalui item kegiatan keagamaan.

C. Rancangan Penelitian

Data penelitian ini termasuk penelitian ekspos fakto suatu penelitian data empirik yang sudah ada di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder antara lain : kegiatan pendidikan sebagai X1, kegiatan sosial sebagai X2, kegiatan agama sebagai X3. Data primer merupakan keberhasilan lembaga perkreditan desa (laba) sebagai Y. Masing – masing kegiatan ada lima kemungkinan jawabannya yakni sangat memadai (SM), memadai (M), cukup memadai (CM), kurang memadai (KM), sangat tidak memadai (STM). Masing-masing jawaban memiliki scor dari 5 sampai 1 untuk pertanyaan/pernyataan positif dan 1 sampai dengan 5 untuk pertanyaan/pernyataan negatif.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kota Denpasar, dengan jumlah LPD sebanyak 30 LPD. Tersebar di Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Selatan, Denpasar Barat dan Denpasar Utara, dengan menyebarkan kuisioner pada pengurus LPD. Untuk keberhasilan (laba) dapat dilihat perkembangan LPD kota Denpasar dalam periode tahun 2012 – 2015 dalam laporan rugi / laba pada Pembina Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten/Kota (PLPDK).

E. Jenis Data

1. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan kuisioner terdiri dari kegiatan sosial, kegiatan budaya, kegiatan agama yang ada di desa.
2. Jenis data Quantitatif berupa laba yang dihasilkan oleh LPD periode tahun 2012 sampai dengan 2015

F. Tehnik Analisis Data

Tehnik Analisis data secara garis besar adalah metode observasi, interview. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi dan metode interview. Ada dua jenis observasi (1) observasi partisipasi. (2) observasi non partisipasi. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan observasi partisipasi pada LPD di Kota Denpasar.

Wawancara digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Metode tersebut digunakan untuk saling melengkapi dan kemudian diolah siap untuk disajikan. Setelah data terkumpul maka selanjutnya dilakukan analisis. Analisis diawali dengan penentuan statistik untuk menguji variabel kegiatan sosial, budaya, agama dengan keberhasilan (laba) LPD di Kota Denpasar dengan rumus regresi dari Sugiyono (2013)

G. Penyajian Hasil Analisis Data

Setelah jelas pertanyaan – pertanyaan dan pembobotannya maka dilakukan uji instrumen yakni untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas.

1. Uji Validitas

Pengujian validitas menunjukkan sejauh mana ukuran tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2013:109). Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Uji validitas dilakukan pada setiap butir pertanyaan. Hasil r hitung dibandingkan dengan r tabel. Dimana $df=n-2$, sig. sebesar 0,05. Dengan kesimpulan sebagai berikut:

Jika $r \text{ tabel} < r \text{ hitung}$ maka valid

Jika $r \text{ tabel} > r \text{ hitung}$ maka tidak valid

i. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan serta konsistensi suatu alat pengukur dalam mengukur gejala yang sama. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2013:110). Menurut Nunnally dalam Ghozali (2012:42) suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60.

ii. Uji Regresi Berganda

Uji regresi dengan pendekatan ordinary least square (OLS) mensyaratkan bahwa sebelum melakukan uji regresi harus terlebih dahulu lolos uji asumsi klasik. Pada penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas dan uji multikolinearitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas yang bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah variabel residual berdistribusi normal. Pengujian normalitas data dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Sminov. Residual berdistribusi normal apabila tingkat signifikansinya menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,05.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* atau *variance inflation factor* (VIF). Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi dan menunjukkan adanya kolonieritas yang tinggi. Jika nilai *tolerance* lebih dari 10% atau VIF kurang dari 10, maka dikatakan tidak ada multikolinearitas

Setelah memenuhi uji asumsi klasik, maka tahap pengujian selanjutnya adalah pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Persamaan regresi berganda akan dipakai untuk menguji hipotesis yang telah dibangun. Analisis regresi ini digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis penelitian terbukti signifikan atau tidak signifikan, dengan persamaan :

$$Y = a + b_1 x_1 + e \quad (1)$$

Dimana:

Y = keberhasilan LPD / laba

a = konstanta

x₁ = kegiatan keagamaan

2. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan persamaan regresi untuk variabel dependen adalah keberhasilan LPD. Variabel independen adalah kegiatan sosial, kegiatan budaya dan kegiatan agama. Hipotesis penelitian diuji pengaruhnya dengan uji F (uji simultan) dan Uji t (uji parsial)

a. Uji Regresi Simultan (Uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan melihat nilai signifikansi F. Jika nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis alternatif tidak dapat ditolak atau dengan $\alpha = 5\%$ variabel independen secara statistik mempengaruhi variabel dependen.

b. Uji Regresi Parsial (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila tingkat signifikansi yang diperoleh (*p-value*) lebih kecil dari 0,05, maka H_0 dapat ditolak atau dengan $\alpha = 5\%$ variabel independen tersebut berhubungan secara statistik terhadap variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah jika probabilitas < 0.05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan keagamaan berpengaruh signifikan terhadap kesehatan keberhasilan LPD dan sebaliknya jika probabilitas > 0.05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan keagamaan tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan LPD.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengujian Statistik

Variabel penelitian terdiri dari kegiatan keagamaan (X_1), sebagai variabel bebas (*independen variabel*). Sedangkan untuk variabel terikat (*dependen variabel*) adalah keberhasilan lembaga Perkreditan Desa (laba) (Y).

B. Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Pengujian validitas menunjukkan sejauh mana ukuran tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2007:109). Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Uji validitas dilakukan pada setiap butir pertanyaan. Hasil r hitung dibandingkan dengan r tabel. Dimana $df=n-2$, sig. sebesar 0,05. Dengan kesimpulan sebagai berikut:

Jika $r \text{ tabel} < r \text{ hitung}$ maka valid

Jika $r \text{ tabel} > r \text{ hitung}$ maka tidak valid

Dari hasil pengujian diperoleh r tabel 0,312 ($df=30-2=28$), sedangkan nilai r hitung seperti pada Tabel 1

Tabel 1
Hasil pengujian r tabel Variabel X1

Variabel	r hitung	r table	Keterangan
Pertanyaan 1	0,439	0,312	Valid
Pertanyaan 2	0,340	0,312	Valid
Pertanyaan 3	0,354	0,312	Valid
Pertanyaan 4	0,404	0,312	Valid
Pertanyaan 5	0,599	0,312	Valid
Pertanyaan 6	0,495	0,312	Valid
Pertanyaan 7	0,548	0,312	Valid
Pertanyaan 8	0,548	0,312	Valid
Pertanyaan 9	0,322	0,312	Valid
Pertanyaan 10	0,372	0,312	Valid

2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan serta konsistensi suatu alat pengukur dalam mengukur gejala yang sama. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2007:110). Menurut Nunnally dalam Ghozali (2006:42) suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$. Tabel 2 menunjukkan besarnya nilai *Cronbach Alpha* variabel.

Tabel 2
Nilai *Cronbach Alpha* variabel

Variabel	Nilai <i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
X1	0,774	Reliabel

1. Uji Asumsi Klasik

Penggunaan alat statistik regresi berganda mensyaratkan dilakukannya pengujian asumsi klasik agar model regresi yang diperoleh dari kuadrat terkecil menghasilkan *Best Linier Unbiased Estimator (BLUES)*, sehingga hasil perhitungan dapat diinterpretasikan dengan efisien dan akurat. Pada penelitian ini akan diuji asumsi klasik adalah uji normalitas dan uji multikolinearitas.

a. Uji Normalitas

Asumsi klasik yang pertama diuji adalah normalitas yang bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas data dilakukan menggunakan uji *Kolmogorov-Sminov*. Residual berdistribusi normal apabila tingkat signifikansinya menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,05.

Dari pengujian diperoleh sig. K-S = 0,943 Karena sig. K-S > 0,05, maka data yang diolah memiliki residual yang berdistribusi normal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters a,b	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,10340286
Most Extreme Differences	Absolute	,097
	Positive	,097
	Negative	-,096
Kolmogorov-Smirnov Z		,529
Asymp. Sig. (2-tailed)		,943

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* atau *variance inflation factor* (VIF). Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi dan menunjukkan adanya kolonieritas yang tinggi. Jika nilai *tolerance* lebih dari 10% atau VIF kurang dari 10, maka dikatakan tidak ada multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas data dalam penelitian ini menggunakan alat bantuan SPSS hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4
Uji Multikolinearitas (Tolerance dan VIF)

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
X1	0,374	2,676	tdk ada multikolinearitas

Pengujian Statistik F

Berdasarkan hasil pengujian F_{hitung} diperoleh nilai F sebesar 441,094 dengan signifikansi 0,000 yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan variabel kegiatan keagamaan (X1) berpengaruh signifikan terhadap kesehatan keberhasilan lembaga perkreditan desa (Y).

Pengujian Statistik t

Pengujian statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dengan taraf signifikansi 0,05, H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila $\text{Sig. } t \leq \alpha = 0,05$, dan H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila $\text{Sig. } t > \alpha = 0,05$. Dari hasil pengujian dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Pengaruh kegiatan keagamaan pada keberhasilan LPD

Hasil uji t variabel kegiatan keagamaan sebesar 2,380 dengan sig. sebesar 0,017 yang berada di bawah 0,05. Dengan demikian H_0 diterima, ini berarti kegiatan keagamaan berpengaruh pada keberhasilan LPD

Tabel 5
Uji t
Coefficients

Model	Unstandadized Coefficients		Standardized Coefficients	t	sig	Colonearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (constant)	.062	.088		.0703	.488		
X1	.019	.049	.169	2.380	.017	.374	2.676

a. Dependent Variable : Y

Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian model analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Model regresi linear berganda ini digunakan untuk membuktikan variabel kegiatan sosial, kegiatan budaya, dan kegiatan agama berpengaruh terhadap keberhasilan LPD.

Hasil pengujian model regresi linear berganda terhadap pengaruh kegiatan sosial, kegiatan budaya, dan kegiatan agama pada keberhasilan LPD ditunjukkan pada Tabel 6 di bawah ini :

Tabel 6
Hasil Regresi

Regresi	Variabel	b	Sig.	Kesimpulan
Persamaan		0,62		
$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \epsilon$	X1	0,190	0,14	berpengaruh signifikan

Dari hasil regresi linear berganda seperti yang ditunjukkan pada tabel 6 diatas, maka persamaan pengaruh kegiatan keagamaan kesehatan keberhasilan LPD adalah:

$$Y = 0,62 + 0,190X_1$$

Berdasarkan berbagai parameter dalam persamaan regresi mengenai pengaruh kegiatan sosial, kegiatan budaya, dan kegiatan agama pada keberhasilan LPD, maka dapat diberikan interpretasi sebagai berikut:

1) Konstanta

Nilai konstanta sebesar 0,62, berarti bahwa jika tidak ada variabel bebas yaitu kegiatan agama atau $X = 0$, maka keberhasilan LPD (Y) menunjukkan nilai sebesar 0,62.

2. Koefisien kegiatan keagamaan

Kegiatan keagamaan berpengaruh signifikan pada keberhasilan LPD, dengan koefisien regresi adalah 0,190. Hal ini menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 persen kegiatan keagamaan akan meningkatkan keberhasilan LPD sebesar 19 persen.

V PENUTUP

1. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kegiatan kegiatan agama pada keberhasilan lembaga perkreditan desa di kota Denpasar. Serta apakah variabel tersebut secara menunjang keberhasilan lembaga perkreditan desa di kota Denpasar.

Dari hasil pengujian analisis data diperoleh hasil bahwa hasil uji F menunjukkan nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. kegiatan agama mampu menunjang keberhasilan lembaga perkreditan desa di kota Denpasar.

Dari hasil uji t diperoleh nilai sig. variabel kegiatan agama sebesar 0,17 dengan nilai sig. sebesar 0,000. Karena variabel menunjukkan nilai sig. dibawah 0,05 maka disimpulkan variabel tersebut secara individu berpengaruh signifikan pada keberhasilan lembaga perkreditan rakyat di kota Denpasar.

Dari hasil regresi linear maka persamaan pengaruh kegiatan agama pada keberhasilan LPD adalah:

$$Y = 0,62 + 0,190X_1$$

Koefisien kegiatan keagamaan

Kegiatan sosial berpengaruh signifikan pada keberhasilan LPD, dengan koefisien regresi adalah 0,190. Hal ini menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 persen kegiatan keagamaan akan meningkatkan keberhasilan LPD sebesar 19 persen.

2. Keterbatasan penelitian

Penelitian ini hanya mengambil satu aspek kehidupan bermasyarakat dalam hubungannya dengan kesehatan keberhasilan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dengan wilayah penelitian yang terbatas (hanya satu kota Penelitian yaitu kota Denpasar. Diharapkan peneliti lain dapat melanjutkan penelitian dampak pelaksanaan CSR terhadap kesehatan LPD dengan disertai perluasan wilayah penelitian.

3. Implikasi referensi

Implikasi dari pelaksanaan penelitian ini mampu memberikan gambaran tentang bagaimana hubungan kegiatan CSR yang dilakukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) terhadap peningkatan kesehatan (keberhasilan) kinerja LPD. Referensi lanjutan yang dapat diberikan dari pelaksanaan penelitian ini adalah kemungkinan pengadaan penelitian yang berkaitan dengan bidang CSR lainnya serta segala bentuk kemungkinannya bagi peningkatan kinerja LPD.

4. Saran

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kegiatan agama berpengaruh pada keberhasilan lembaga perkreditan desa di kota Denpasar. Maka dari itu disarankan kepada lembaga perkreditan desa yang ada di kota Denpasar untuk selalu meningkatkan CSR pada kegiatan-kegiatan di bidang agama terutama dimasyarakat sekitar, karena terbukti mampu mendukung keberhasilan dan kemajuan dari lembaga perkreditan desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ang, Robert. 1997. *The Intelligent to Indonesian Capital Market*, 1st Edition. Mediasoft Indonesia.
- Alfian, 2015. Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan. PT. Gramedia, Jakarta.
- Ashton, H. Robert., Jhon J. Willington, and Robert K. Elliot, 1997. An Empirical Analysis of Audit Delay, *Journal of Accounting Research*, Vol. 25, Autumn.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pusat Statistik, Tahun 2014. Profil Kota Denpasar, Denpasar 2014.

- Beasley, M., 2006. An Empirical Analysis of The Relation Between The Board of Director Composition, *Working Paper*, University of Rochester, Penn State.
- Craib. 2006. Teori-Teori Sosial Modern. CV. Rajawali, Jakarta.
- Compbell. 2014. Tujuh Teori Sosial. Kanisus.
- Dahya. J., McConnell, J J. and Travlos, N.G.2002. The Cadbury Committee, Corporate Performance, and top Management turnover. *The Journal of Finance*. 57(1): 461-483.999
- Dastgir, Mohsen and Velashani, Ali, Saeedi. 2008. Comprehensive Income and Net Income as Measures of Firm Performance: Some Evidence for Scale Effect. *European Journal of Economic. Financial and Administrative Sciences*. Issue 12.
- Davies, B and Whittred, GP, 2010. The Association Between Selected Corporate Attributes and Timeliness in Corporate reporting: Further Analysis. *Abacus*, Vol 16 (1), June: p. 48-60
- Dye, R.A, and Sridhar, S.S, 1975. Industry-wide Disclosure Dynamics. *Journal of Accounting Research*, Vol. 33, Spring, p. 157-174.
- Dyer, J.CIV and A.J.McHugh,1995. The Timeliness of The Australian Annual Report. *Journal of Accounting Research*; Autumn:.p. 204-219.
- Dwi Laba I Kadek, 2011. Evaluasi kinerja LPD Desa Adat Celuk Sukawati Gianyar
- Fama, E. dan M. Jensen, 1993. Separation of Ownership and Control. *Journal of Political Economy* 88: 288-308.
- FASB, 1998. *Statement of Financial Accounting Standards No. 130:reporting Comprehensive Income*. Stamford, Connecticut.
- FCGI, 2002. *Pedoman Komite Audit Yang Efektif*.
- George Retzer 2012. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Jakarta : PT.Gajah Grafindo Persada, Jakarta.
- Gorda, I. G. N. 1999. Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Ekonomi. Denpasar Widya Kriya Gematama.
- _____, 1999. Manajemen Dan Kepemimpinan Desa Adat Di Provinsi Bali. Denpasar Widya Kriya Gematama
- _____, 2003. Membudayakan Kerja Berdasarkan Dharma. Pusat Kajian Hindu, Budaya dan Prilaku Organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja Jalan Yudistira II Singaraja.
- Ghozali, Imam. 2012. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam, 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gilling, M.D, 1977. Timeliness in Corporate Reporting: Some Further Comments. *Accounting and Business Research*, 8 (29), Winter, p. 35-40.
- Givoly, D., and D.Palmon,1992. Timeliness of Annual Earning Announcement: Some Empirical Evidence. *The Accouting Review* 57: July:486-508.
- Gujarati, Damodar N. 2003. *Basic Econometric*. 4th Edition. McGraw Hill
- Halim, Varianada, 2001 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay: Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan di Bursa Efek Jakarta, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 2 No. 1, April p.63-75.
- Hartono, Jogiyo. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- Immanuel Wlurstein. 2004. Lintas Batas Ilmu Sosial, Yogyakarta : L Kis.
- Indriyo Gitosudarmo ; Agus Mulyono. 2011. Prinsip Dasar Management, BPFE Yogyakarta
- J. M. A. Tahuteru, 2011. Prinsip-Prinsip Managemen, Bhatara 2011, Jakarta. John F. Mce, Department or Management, 2011
- Jensen, M, and W.Meckling,2004. Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*: 305-360.
- _____, 2004. The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of Internal Control Systems. *The Journal of Finance*. 48(3): 831-881.
- Jordan, Charles. E. and Clark. Stanley. J. 1998. Comprehensive Income: How Is It Being Reported and What Are Its Effects?. *The Journal of Applied Business Research*. Vol. 8. Number 2.
- Kaho. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Cetakan Keempat,Rajawali, Jakarta.
- Kantor Dokumentasi Budaya Bali Provinsi Daerah Tingkat I Bali. 2011. Tutar Buddha Sawenag (Ahli Aksara dan Ahli Bahasa), Denpasar.
- Kotler, Philip, Management Pemasaran, Jakarta. PT. Prenhallindo, 2012.
- Khomsiyah, 2005. “Analisis Hubungan Struktur dan Indeks Corporate Governance dengan Kualitas Pengungkapan”. (Desertasi). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Kim, Oliver., & Robert E. Verrechia. 1994. Market Liquidity and Volume Around Earning Announcement. *Journal of Accounting and Economics*. p. 41-67.
- Lorsch, J.W. 1989. Pawns or Potentates: The Reality of America’s Corporate Board. *Boston Harvard Business School Press*.
- Mahmud M. Hanafi dan Abdul Halim, 2007. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi ketiga. Yogyakarta. AMP-YKPN.
- Mizruchi, M. S. 1983. Who Control Whom? An Examination of the Relation between Management and boards of Directors in Large American Corporation. *Academy of Management Review*. 8. p. 426-435.

- Mantra, I. B. 1993. *Kebudayaan Dan Kepribadian Bangsa, Upadashastra*.
 _____, 1996. *Landasan Kebudayaan Bali*. Yayasan Dharma Sastra Denpasar.
- Mudrajad Kuncoro 2011. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*
- Na'im, Ainun, 2001. Nilai Informasi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan: Analisis Empirik Regulasi Informasi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol. 14.No.2.P.85-100.
- Owusu, Stephen & Ansah, 2000. Timeliness of Corporate Financial Reporting in Emerging Capital Market: Empirical Evidence From The Zimbabwe Stock Exchange. *Journal Accounting and Business*. Vol.30.p.241.
- Pitana. 2010. *Dinamika Masyarakat Dan Kebudayaan Bali*, BP.
- Rasyid, 2010. *Kajian Awal Birokrasi Pemerintah dan Politik Order Baru*, Jakarta, Yarsit Watampone
- Sarini Kadek, 2009 Universitas Pajajaran Pengaruh Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) terhadap Kesejahteraan Masyarakat
- Taliziduhu Ndraha, 2011. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Jakarta. Rineka Cipta.
- Titib. 2010. *Teknologi & Simbol-Simbol Dalam Agama Hindu*. Badan Litbang Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, bekerja sama dengan Paramita Surabaya.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Otonomi Daerah Citra Umbara, Bandung 2003.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali, Nomor 8 Tahun 2002, tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Biro Hukum dan Ham Setda Provinsi Bali.
- W. Geriya. 2010. *Tranformasi Kebudayaan Bali memasuki abad XXI* Denpasar.
- Yudha Triguna 2010. *Mengenal Teori-Teori Pembangunan*, Denpasar : Widya Dharma.